
KONSTRUKSI REALITAS MEDIA (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN UU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW DALAM MEDIA ONLINE VIVANEWS DAN TIRTO.ID)

Ika Novita, Icha Nur, Tiara Rose dan Muhammad Reyhan

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Nasional Jawa Timur, Indonesia

Email: Iknov28@gmail.com, Ichanurrahmawati20@gmail.com,

Tiaraagrippina99@gmail.com dan Reyhanirsyadi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima

18 Desember 2020

Diterima dalam bentuk revisi

12 Januari 2021

Diterima dalam bentuk revisi

Keywords:

framing analysis; media; omnibus law; online news portal; copyright law

ABSTRACT

This study aims to see how the frame structure of online news portals in preaching the Omnibus Law in vivanews online media and Tirto.id this topic is interesting to be research material. This study used framing analysis according to Robert N. Entma (Entman, 2004) by comparing the highlighting of aspects and selection of issues on the two news portals reviewed from the selection of sources, the use of words in news headlines, the selection of images, and recommendations or suggestions in the news about the Copyright Act. The results of research on the news of both Tirto.id and Vivanews show the editorial policy and ideology of each media, where Vivanews as a newspaper with a political background shows a very careful attitude when preaching sensitive things. While in Tirto.id, the frame on the news shows the aspirations of people who work as workers / corporate employees, so that the news contains elements of rejection, disapproval, and controversy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana struktur frame portal berita online dalam memberitakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam media online Vivanews dan Tirto.id topik ini menarik untuk menjadi bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* menurut Robert N. Entma (Entman, 2004) dengan membandingkan penonjolan aspek dan seleksi isu pada kedua portal berita tersebut ditinjau dari pemilihan narasumber, penggunaan kata dalam judul berita, pemilihan gambar, dan rekomendasi atau saran dalam berita mengenai UU Cipta Kerja. Hasil penelitian pada berita baik Tirto.id maupun Vivanews menunjukkan kebijakan editorial dan ideologi masing-masing media, di mana Vivanews sebagai surat kabar dengan pemilik yang berlatar belakang politik lebih menunjukkan sikap yang

Kata kunci:

analisis framing; media; omnibus law; portal berita online; UU cipta kerja

sangat hati-hati ketika memberitakan hal-hal yang sensitive. Sedangkan pada Tirto.id, frame pada beritanya memperlihatkan aspirasi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh/karyawan korporat, sehingga beritanya mengandung unsur penolakan, ketidaksetujuan, dan kontroversi.

Pendahuluan

Masyarakat saat ini tengah dihebohkan terkait pemberitaan mengenai UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam hal ini, diantaranya: Penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). UU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Sidang Paripurna yang dilakukan sore kemarin. Pengesahan UU Cipta Kerja tetap tancap gas meskipun penolakan dan protes lantang disuarakan oleh masyarakat.

Dalam kasus mengenai UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ini menarik untuk menjadi bahan penelitian, Bagaimana sikap media yang harus bersikap dan bagaimana tanggapan dari media lainnya yang tidak memiliki hubungan apapun dengan kasus ini. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan analisis *framing* sebagai pendekatan dalam melakukan penelitian ini. Dikarenakan, pertama begitu pesatnya perkembangan penggunaan media online saat ini, sehingga media online dijadikan sebagai salah satu sumber informasi utama, bahkan menurut survei Nielsen dikatakan bahwa pembaca media online lebih banyak dibandingkan media cetak maupun elektronik. Semakin banyak orang yang membaca maka semakin luas pengaruh yang disampaikan dan semakin memungkinkan para pemilik media menggiring opini dan membentuk citranya seperti yang dilakukan oleh Vivaneews dan Tirto.id. Kedua portal media online tersebut merupakan dua diantara beberapa media online Nasional. Dimana pada kasus ini Vivaneews dan Tirto.id memiliki sikap berbeda dalam memberitakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Kedua, semakin banyak konten berita dalam portal berita online yang secara sengaja ataupun tidak menampilkan representasi ideologi kepemilikan perusahaan medianya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari membuktikan bahwa isi dari media bukanlah sebuah cermin dari realitas yang sebenar-benarnya, tetapi ada pembentukan isi media yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang dapat menghasilkan berbagai versi dan perbedaan dari realitas yang ada (Kurniasari & Aji, 2018). Faktor kepemilikan yang memberikan pengaruh pada agenda penyusunan teks media menjadi salah satunya. Dimana keterlibatan kepentingan pemilik media turut menjadi pertimbangan dalam memproduksi konten-konten berita.

Kemudian dijelaskan lebih dalam bahwa yang dimaksud konten media ialah sebuah kombinasi antara program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta

adanya pengaruh dari luar seperti *stake holder*, regulasi pemerintah, pengiklan dan lain sebagainya (Morissan, 2010). Yang mana hal ini menunjukkan bahwa dalam memproduksi sebuah konten berita banyak faktor yang melatar belakangnya, diantaranya ada faktor eksternal dan internal yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembentukan sebuah kontem media. Padahal jika mengacu pada peraturan pers yakni Undang-undang pers No.40 tahun 1999 tentang pers indonesia dimana media massa dan wartawan harus bersikap independen dalam menyajikan berita, independen ialah tidak memihak, selain itu juga media massa harusnya memberitakan dengan sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dari pihak -pihak manapun dan independen dalam segala sesuatu termasuk menyangkut kepentingan perusahaanya.

Alasan peneliti menganalisa media online Vivanews dan Tirto.id dikarenakan setelah UU Cipta Kerja disahkan pada awal bulan Oktober, membuat kasus ini menjadi *trending* topik pembicaraan diberbagai media, termasuk diantaranya Vivanews dan Tirto.id. Kedua media tersebut cukup sering mem *follow up* dan mengupdate perkembangan berita terkait topik UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Selain itu mereka menunjukkan perbedaan pembingkaiian berita terkait topik tersebut. Vivanews dalam situs Alexa.com, per September 2020, peringkat ke 1.952 (per Desember 2015) situs yang sering dikunjungi. Sedangkan Tirto.id ada di peringkat ke 50 (per November 2019) menurut Alexa. Peneliti juga memilih periode Tanggal 05 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020 dikarenakan, kedua media di atas cukup sering memberitakan hal tersebut, terhitung Vivanews menghasilkan 1914 berita dan Tirto menghasilkan 812 berita dan pada bulan tersebut banyaknya masyarakat menyuarkan menolah pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Media merupakan sebuah agen yang aktif dalam menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2011). Media bisa menjadi sarana penyebar ideology penguasa, alat legitimasi dan pengontrol wacana publik (Sobur, 2004). Dalam hal ini menjelaskan bahwa media memiliki tanggung jawab atas sajian informasi yang ditujukan kepada khalayak. Akil mengatakan media sejatinya memiliki pengaruh yang besar dan kuat untuk dapat membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku khalayak media (Akil, 2014). Agar perilaku media selaras dengan tujuan nasional, maka dibutuhkan regulasi yang dapat menjamin profesionalisme media. Pemerintah telah mengatur regulasi tentang kegiatan bermedia kedalam berbagai bentuk UU yang diantaranya UU Pers, UU Penyiaran dan UU ITE. Regulasi yang mengatur kegiatan bermedia adalah diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Untuk mendukung UU pers maka dibentuk juga Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan atau pelaku industri media yang kemudian diatur oleh Dewan Pers. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Media penyiaran terdiri dari radio dan televisi yang dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik secara umum dibawah naungan Koinfo.

Pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ini menuai pro dan kontra di dalam masyarakat, Ada pihak yang setuju dan tidak setuju atau bahkan netral terkait kasus ini. Sama halnya dengan pemberitaan di media terkait kasus ini cukup beragam ada pro dan kontra tergantung bagaimana *framing* pemberitaan yang mereka bentuk, dan sudut pandang peristiwa apa yang ingin mereka tonjolkan. Hal yang menjadi sorotan yakni UU Cipta Kerja (Omnibus Law), menjadikan berbagai situs media membingkai atau memframing berita dengan sudut pandang yang berbeda-beda, yang kemudian dapat menjadi penggiring opini khalayaknya. Menurut Eriyanto dalam (Wicaksono, 2017) *framing* merupakan suatu cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media, baik dari sisi menonjolkan aspek tertentu, menekankan bagian tertentu, maupun cara bercerita mengenai realitas atau peristiwa tersebut dibentuk.

Dalam buku "Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online" milik (Romli, 2012) menjelaskan bahwa media online merupakan salah satu bentuk media massa yang tersaji secara online dengan basis internet. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi membuat banyak perusahaan media yang bermunculan di Indonesia. Indonesia memiliki delapan raja media yang ada di jalur media massa tradisional televisi dan cetak. Jumlah ini terhitung banyak di banding negara-negara lain. Belum lagi saat ini muncul banyak sekali perusahaan media online di Indonesia. Semakin pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat indonesia beralih membaca berita online. Karena memang pada dasarnya orang Indonesia suka yang praktis dan ini ditemukan dalam media online.

Keunggulan media online menurut (Suprobo et al., 2016) media online memiliki beberapa keunggulan. Diantaranya adalah informasi atau berita yang disajikan bersifat *up to date*, *real time* dan praktis. *Up to date* berarti menunjukkan sifat baru dimana setiap jam atau bahkan menit media online selalu mengeluarkan berita-berita terbarunya. *Real time* yakni pada saat peristiwa berlangsung di mana informasi dapat dikirim langsung ke meja redaksi dan tersebar ke masyarakat dan Praktis yakni dalam membaca berita kita hanya membutuhkan perangkat elektronik (HP, Laptop dst) dan jaringan internet saja selain itu kita dapat pemeberitaan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Namun keunggulan media online ini juga memiliki pengaruh yang negatif. Yakni karena berita sifatnya yang *up to date* dan *real time* maka pengeditan berita dilakukan dengan waktu yang relatif singkat sehingga banyak sekali di temui kesalahan-kesalahan penulisan dan human eror lainnya pada konten berita di media online. Hal ini terjadi karena dalam sehari portal media online bisa menghasilkan belasan hingga puluhan berita dan juga banyak sekali berita-berita yang tidak diragukan kredibilitasnya seperti asal mengambil tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Ini membuat banyak sekali berita atau informasi informasi *hoax* yang beredar di masyarakat. Sebagai lembaga yang berwenang mengatur segala peraturan negara termasuk halnya arus informasi, pemerintah membuat peraturan atau payung hukum bagi perusahaan media berserta aturan kegiatan di dalamnya, agar sesuai dengan UU yang berlaku.

Mengingat semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi semakin pula heterogen media semakin tidak terkendalinya arus informasi yang masuk, negatifnya banyak informasi yang masuk yang bertentangan dengan tujuan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana struktur frame portal berita online dalam memberitakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam media online Vivaneews dan Tirto.id topik ini menarik untuk menjadi bahan penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi edukasi bagi para pembaca. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang kegiatan pandangan masyarakat di Indonesia. Kajian tentang framing berita pada dua portal berita online di Indonesia memang cukup beragam. Namun baru sedikit riset yang secara spesifik fokus pada framing pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang dapat dikatakan sedang eksis pada tahun 2020 lalu. Oleh karena itu, riset ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru terkait *framing* antara Tirto.id dan Vivaneews sebagai portal berita online. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada masyarakat Indonesia yang mengalami dampak dari terciptanya UU Cipta Kerja Omnibus Law, tidak hanya sekedar masyarakat, namun juga masyarakat sebagai pihak yang notabene berprofesi sebagai buruh/karyawan. Melalui kajian ini diharapkan pembuat kebijakan dan masyarakat pada umumnya memiliki bahan bacaan dan diskusi yang dapat menambah wawasan seputar framing UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam dua portal berita online yaitu Tirto.id dan Vivaneews.

(Bungin, 2011), pengemuka teori konstruksi sosial media massa, mengemukakan bahwa media massa berpengaruh dalam konstruksi sosial atau realita. Media massa dianggap sangat substantif dalam proses eksternalisasi, subjektifikasi dan internalisasi. Karena jangkauan media yang luas substantif yang dibangun oleh media massa memiliki sirkulasi informasi yang cepat dan meluas sehingga konstruksi sosial yang telah dibentuk dapat disebarakan secara langsung dan merata.

Metode Penelitian

Penelitian ini berbasis analisis wacana media dengan metode kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014). Pendekatan kualitatif ialah lawan dari pendekatan kuantitatif. Menurut (Indriastuti, 2018), pendekatan kualitatif tidak bermaksud untuk mengukur secara angka dan statistik melainkan memahami karakter dari fenomena tersebut (Moleong, 2013). Teknik analisa penelitian ini menggunakan model analisis *framing* menurut (Entman, 2004) yang telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat dua dimensi besar dalam *framing Entman* yaitu, mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu. Kedua faktor ini membantu untuk mempertajam framing berita yang ditampilkan dan penekanan isi beritanya.

Dalam praktiknya, analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologi, politik atau kultural yang melingkupinya (Fiorentina et al., 2018). Berita yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

Tabel 1
Daftar Judul Berita *Tirto.id* dan *Vivanews*

Tirto.Id	Vivanews
Tolak UU Cipta Kerja, Massa Gebrak Demo Istana Negara Lagi	Moeldoko Klaim UU Cipta Kerja Untungkan UMKM dan Koperasi
Di bawah Jokowi, Oligarki Kian Mencengkram & Demokrasi Makin Semu	DPR: Omnibus Law Permudah Birokrasi Perizinan
Omnibus Law Cipta Kerja Merugikan Buruh Memanjakan Oligarki.	

Hasil dan Pembahasan

Berita memiliki salah satu fungsi untuk memberikan edukasi dan kesadaran terhadap khalayak mengenai isu-isu dan peristiwa yang terjadi, sehingga masyarakat lebih mengerti dan memahami berbagai kejadian atau peristiwa tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana media mengkonstruksikan suatu realitas dalam bentuk wacana yang bermakna, karena sejatinya menurut Gaye Tuchman peristiwa yang ditampilkan oleh media yang sebelumnya dikonstruksikan oleh media tersebut berdasarkan penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana (Sobur Alex, 2013).

Sebuah portal berita menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dalam proses konstruksi realitas oleh sebuah portal berita, tentunya memiliki sudut pandang sendiri-sendiri ketika melihat suatu peristiwa, salah satunya bahasa, dimana bahasa adalah unsur utama. Bahasa merupakan alat konseptualisasi dan alat narasi. Penggunaan bahasa merupakan simbol tertentu untuk menentukan format narasi dan makna tertentu yang ingin bingkai oleh sebuah portal berita.

Dalam membeberkan suatu peristiwa, portal media akan melampirkan fakta-fakta yang ada. Terkait dengan hal tersebut terdapat dua dimensi besar dalam framing Entman yaitu, mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu.

A. Analisis Framing Dua Dimensi Menurut Robert M. Entman

1. Seleksi Isu

Analisis seleksi isu pada portal media online Vivanews.com, mengenai fakta-fakta yang mengarah dalam keputusan pemerintah. Pada analisis seleksi isu ini, berita dari Vivanews.com cenderung lebih menampilkan isu mengenai fakta-fakta yang mengarah dalam ranah kritik terhadap keputusan pemerintah tentang UU cipta kerja (omnibus law). Narasumber dalam ketiga berita dari Vivanews.com antara lain, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspari Gaus, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pada ketiga berita yang telah mewakili penelitian ini juga melihat fakta-fakta yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh Vivanews.com, pertama yaitu fakta

yang dimasukkan antara lain, pernyataan dari Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspari Gaus menjelaskan bahwa inti dari penetapan Omnibus Law itu adalah bagaimana mempercepat, mempermudah, dan memperlancar urusan perizinan. Karena di Omnibus Law ada 79 UU berbenturan antara satu dengan yang lain lalu diharmonisasikan. Jadi bila mengurus izin tidak perlu fisik, namun melalui *online* saja. Apalagi, UMKM tidak perlu mengajukan izin hanya pada tahap mendaftarkan diri saja.

Kemudian fakta berikutnya mengenai keputusan pemerintah selanjutnya terhadap UU Cipta Kerja yaitu Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan menerima dua permohonan uji materi, hal tersebut merupakan pernyataan dari Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK. Fakta berikutnya menurut pernyataan dari Fajar Laksono, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa selain memudahkan dalam hal perizinan, UU Cipta Kerja (omnibus law) sebagai landasan bagi pemerintah guna memberikan dukungan secara terpadu kepada UMKM.

Pada ketiga berita Vivanews.com tersebut lebih menekankan pada isu fakta-fakta keputusan pemerintah terhadap UU Cipta Kerja (omnibus law) disini Vivanews.com menampilkan sisi pro terhadap isu keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih terlihat sisi pro kepada pemerintah karena memasukkan pernyataan-pernyataan yang dilayangkan oleh staf pemerintahan mengenai keuntungan UU Cipta Kerja (omnibus law) dalam mengatasi permasalahan ekonomi saat ini.

Sementara itu, dalam berita Tirto.id juga memaparkan fakta-fakta mengenai kasus UU Cipta Kerja (omnibus law) yang ditolak oleh masyarakat. Narasumber dari kedua berita Tirto.id antara lain, Ilhamsyah sebagai Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Peter van Der Werf sebagai Senior Engagement Specialist Robeco, Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanganan Modal (BKPM), dan Wakil Menteri Luar Negeri yaitu Mahendra Siregar.

Adapun fakta-fakta yang ditampilkan melalui pernyataan dari berita pertama yaitu pendemo akan jalan kaki dari kantor ILO terletak di daerah Menteng, Jakarta lalu menuju Istana Negara. Mereka kembali menyuarakan penolakan omnibus law selama tiga hari 20-22 Oktober. Dalam rangkaian demo tiga hari merupakan bentuk penolakan terhadap pemerintah dan DPR. Penolakan tersebut semakin nyata setelah melihat kesimpangsiuran jumlah halaman dari 812 halaman saat diserahkan ke Sekretariat Negara lalu berubah jadi 1.187 halaman. Ilhamsyah Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tersebut terlalu dipaksakan dan memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk ditimbang kembali karena belum matang serta peluang adanya perubahan pasal sangat besar.

Selanjutnya pada berita kedua yang menampilkan fakta-fakta antara lain, 35 investor mengirim surat terbuka kepada Pemerintah Indonesia. Tercatat total aset yang telah dikelola oleh 35 investor mencapai 4,1 triliun dolar AS. Para investor juga menyoroti perkara lingkungan hidup, perubahan kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, sistem informasi dan ketenagakerjaan. Robeco, Peter van Der Werf satu dari 35 investor memberi pernyataan bahwa perlunya reformasi aturan terkait berusaha di Indonesia, para investor memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif pada perlindungan lingkungan hidup disebabkan oleh UU Cipta Kerja (omnibus law).

Dari kedua berita Tirto.id tersebut yang cukup terlihat yaitu lebih dominan dari sisi pro terhadap penolakan pengesahan UU Cipta Kerja (omnibus law) yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut merugikan masyarakat karena meningkatnya angka pengangguran setelah ditetapkan UU Cipta Kerja (omnibus law).

2. Penonjolan Aspek

Pada analisis ini memperlihatkan aspek-aspek yang menonjol berupa pemilihan kata atau kalimat dalam judul, visualisasi gambar yang ditayangkan, dan penggunaan kalimat penegas di dalam isi berita. Dari penonjolan aspek, dapat diketahui perbedaan framing pada isu yang sama pada dua portal yang berbeda, dimana nantinya akan terlihat bagaimana suatu portal berita membingkai kejadian atau peristiwa yang dikemas pada beritanya baik dari aspek pemilihan gambar, pembuatan judul dan pemilihan kata dalam isi beritanya, sehingga akan terlihat keberpihakan atau tidaknya suatu portal berita.

Terdapat penonjolan aspek berupa kalimat pernyataan berupa kritik mengenai rencana pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law dari pemerintah, pada bagian judul berita Tirto.id, **“Tolak UU Cipta Kerja, Massa Gebrak Demo Istana Negara Lagi”**, selanjutnya pada bagian isi teks terdapat penonjolan aspek berupa kalimat, *“Itu kan bentuk konkret menunjukkan bahwa ini [UU Cipta Kerja] terlalu dipaksakan. Nah harusnya dengan melihat itu harusnya Jokowi sadar bahwa UU ini sebenarnya belum matang. Dan peluang untuk adanya perubahan-perubahan pasal itu sangat besar,” kata Boing.*” (pada berita berjudul: Tolak UU Cipta Kerja, Massa Gebrak Demo Istana Negara Lagi).

Pada berita milik Tirto.id menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah mengalami penolakan dari masyarakat sehingga membuat RUU tersebut mengalami kontroversi, dan menimbulkan demo besar-besaran selama tiga hari berturut-turut sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang cipta kerja yang dibahas dan disahkan oleh pemerintah dan DPR, salah satunya menimbulkan masalah perusakan fasilitas di berbagai daerah di Indonesia. Dalam beritanya, masyarakat berharap agar pemerintah dapat memperbaiki UU Cipta Kerja Omnibus Law yang dianggap oleh sebagian

masyarakat isi dalam undang-undangnya cenderung merugikan pihak masyarakat yang berprofesi sebagai buruh/karyawan. Jika tidak segera diadakan perubahan penerbitkan peraturan pengganti perundang-undangan dalam kebijakan UU Cipta Kerja Omnibus Law, dampak jangka panjangnya akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan korban PHK di Indonesia yang akan terus mengalami pelonjakan.

Adapun kata yang sering muncul dan diangkat dalam berita tersebut yaitu, buruh, penolakan, demo, aksi, UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo dan pemerintah. Tirto.id dalam beberapa beritanya yang membahas mengenai UU Cipta Kerja cenderung lebih sering menggunakan gambar presiden Jokowi, yang berarti presiden sebagai aktor utama. Selain itu, gambar pada ilustrasi bertuliskan nuansa penolakan juga sering digunakan dalam pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang dibuat oleh Tirto.id.

Tabel 2
Penonjolan Aspek Dalam Berita Tirto.id

No	Gambar dan Judul Berita
1.	 Tolak UU Cipta Kerja, Massa Gebrak Demo Istana Negara Lagi
2.	 Omnibus Law Cipta Kerja Merugikan Buruh Memanjakan Oligarki
3.	 Di bawah Jokowi, Oligarki Kian Mencengkram & Demokrasi Makin Semu

Berbeda dengan Tirto.id, Vivanews dalam beritanya mengenai isu tersebut menggunakan kalimat yang bermakna setuju terhadap kinerja pemerintah terkait

UU Cipta Kerja Omnibus Law, salah satunya yaitu pada judul beritanya **“Moeldoko Klaim UU Cipta Kerja Untungkan UMKM dan Koperasi”** terlebih penekanan tersebut terdapat dalam isi berita berupa kalimat pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, *“Selain kemudahan masalah perizinan, Undang-undang Cipta kerja juga menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan secara terpadu bagi UMKM”* (dalam berita: Moeldoko Klaim UU Cipta Kerja Untungkan UMKM dan Koperasi) dari pernyataan yang ada dalam berita Vivanews memperlihatkan sisi positif yang ingin diperlihatkan dari ramainya pemberitaan mengenai penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

Dalam berita Vivanews juga terdapat kata yang sering muncul sebagai tanda penekanan atau penonjolan isu yang ditampilkan oleh pihak Vivanews, kata yang sering muncul antara lain, pemerintah, untungkan, dan UMKM. Vivanews dalam beritanya mengenai masalah tersebut menggunakan gambar Moeldoko pada saat sedang diwawancarai sebagai perwakilan dari pemerintah, di berita lain Vivanews menggunakan gambar potret tampak depan Gedung DPR, gambar tersebut sebagai ilustrasi anggota DPR sebagai pembuat UU Cipta Kerja Omnibus Law. Vivanews dalam pemberitaannya cenderung memperlihatkan sisi positif, dapat dilihat dari judul pada beritanya dan penonjolan aspek pada isi berita berupa pernyataan-pernyataan dari narasumber dari Vivanews tersebut.

Tabel 3
Penonjolan Aspek Berita Vivanews

No	Gambar dan Judul Berita
1.	 Moeldoko Klaim UU Cipta Kerja Untungkan UMKM dan Koperasi
2.	 DPR: Omnibus Law Permudah Birokrasi Perizinan

Pada kedua portal berita online, baik Tirto.id maupun Vivanews yang membahas mengenai UU Cipta Kerja Omnibus Law, terdapat perbedaan keberbikinan media yang terlihat dari berita yang diterbitkan. Pada portal berita Tirto.id lebih berpihak kepada masyarakat, sedangkan Vivanews cenderung berpihak kepada pemerintah.

B. Analisis Framing Robert M. Entman Empat Elemen

Pemberitaan mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Sidang Paripurna, sehingga menyebabkan penolakan dan demo oleh masyarakat, pasalnya dalam UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR terdapat nilai-nilai yang dianggap nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat menengah kebawah. Dalam hal ini bagaimana Tiro.id dan Vivanews mbingkai pemberitaan mengenai hal tersebut berbeda, dimana pada Tirto.id melihat bahwa masalah tersebut dari sudut pandang masyarakat yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yang cukup menimbulkan kontroversi, sedangkan pada berita yang dimuat pada Vivanews memperlihatkan masalah tersebut dari sudut pandang manfaat dari disahkannya UU Cipta Kerja, dimana pemerintah dan DPR sebagai aktor utama dalam memberikan pernyataannya.

Jika ditinjau dari pemilihan narasumber pada kedua portal berita online tersebut, dalam pernyataan yang ditampilkan pada teks berita beserta penonjolan aspek yang ditunjukkan, Tirto.id memperlihatkan sisi kotra dari masyarakat terhadap disahkannya UU Cipta Kerja, karena dinilai akan merugikan masyarakat dengan pasal-pasal yang ada didalamnya, aktor utama yang sering dibicarakan dan mendapat kritik dalam berita Tirto.id yaitu presiden Jokowi, dimana dalam beritanya Tirto menyebutkan bahwa pemerintah yang seharusnya mengatasi buruknya kualitas investasi, namun dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja justru nantinya dinilai akan berpotensi besar merampas kesejahteraan buruh dan kaum yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari terciptanya lapangan pekerjaan yang datangnya melalui investasi.

Tirto.id memperlihatkan keberpihakannya terhadap masyarakat, dari isi ketiga berita yang dianalisis memperlihatkan bahwa Tirto.id ingin memperlihatkan bentuk kekecewaan masyarakat karena evaluasi yang diingkan oleh masyarakat terhadap draf UU Cipta Kerja tersebut tak digubris, hal tersebut yang menjadikan masyarakat sehingga melakukan penolakan dan melakukan demo besar-besaran, mereka menilai bila dari sisi investor merasa keberatan dan dari pihak buruh merasa dirugikan, nantinya yang paling diuntungkan dengan adanya UU Cipta Kerja tidak lain adalah para pengusaha kelas kakap yang bergerak di industri dengan padat modal.

Tirto.id mengemas berita mengenai kinerja pemerintah dan para dewan perwakilan rakyat dalam masalah disahkannya UU Cipta Kerja kurang dalam hal sosialisasi mengenai hal tersebut, terdapat pernyataan dari Ilhamsyah selaku Ketua

Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengatakan bahwa para demonstran mendorong agar Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengganti perundang-undangan, pemerintah diharapkan untuk dapat merampingkan UU lewat pembahasan per undang-undangan dengan komprehensif dan berbicara dengan semua pihak dari segala lini masyarakat agar terdapat transparansi mengenai undang-undang yang dibuat, karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal tersebut.

Disisi lain Tirto.id dalam beritanya menjabarkan bagaimana anggapan masyarakat terhadap disahkannya UU Cipta Kerja. Dalam Tirto.id terdapat anggapan dari masyarakat bahwa pihak yang paling diuntungkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja adalah oligarki para penyokong Pemerintah yang dari data yang dilansir pada Tirto.id menunjukkan bahwa terdapat 45,5 persen dari total 575 anggota DPR yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 2019 yang menjabat selama periode ini adalah para direksi dan komisaris di lebih dari 1000 perusahaan ternama. Semakin terlihat lebih jelas adanya oligarki tersebut bila dilihat dari komposisi partainya yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB, dimana seperti yang diketahui adalah partai-partai yang terbanyak mengirim pengusaha ke gedung parlemen dan partai-partai tersebut adalah para pendukung terciptanya Omnibus Law Cipta Kerja.

Dilain sisi, Vivanews dalam kedua beritanya mengenai UU Cipta Kerja lebih menonjolkan bagaimana masalah tersebut dari sudut pandang manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Dari sisi perizinan terkait pendirian usaha. Dalam berita pada portal berita online Vivanews menilai bahwa disahkannya UU Cipta Kerja nantinya memberikan kemudahan untuk para calon pendiri usaha yang sebelumnya memiliki masalah terhadap perizinan akan dipermudah dan tidak lagi berbelit-belit untuk mengurus perizinan usahanya. Dengan melihat dari sudut pandang dan memasukkan pernyataan dari Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspari Gaus yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan keberpihakan kepada masyarakat.

Berbeda dengan Tirto.id, Vivanews sangat menekankan sisi positif dan kelebihan dari nilai-nilai yang terdapat pada UU Cipta Kerja. Framing pada portal berita online Vivanews terhadap isu tersebut memandang dari sudut pandang narasumber pada beritanya, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengklaim di luar berbagai hal yang banyak diperdebatkan saat ini terkait UU Cipta Kerja tersebut, Undang-undang ini nantinya akan memberikan berbagai keuntungan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Karena sesungguhnya masih banyak hal baik bagi para pelaku UMKM termasuk sektor koperasi.

Vivanews dalam mengemas berita mengenai masalah tersebut condong kepada sisi pro terhadap disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR. Ditengah ramainya masyarakat yang menolak isu tersebut, Vivanews menekankan dari kedua beritanya yaitu sisi lain berupa manfaat dan sisi positif dari disahkannya UU Cipta Kerja. Framing pada berita yang dibawa Vivanews yaitu keuntungan dari substansi UU Cipta Kerja berpihak kepada masyarakat.

Tabel 4
Perbandingan Empat Elemen Framing Robert M. Entman pada Tirto.id dan Vivanews

Elemen Framing	Tirto.id	CNN Indonesia
<i>Define problems</i> (mendefinisikan masalah)	Substansi UU Cipta Kerja dapat merugikan masyarakat kecil.	Substansi UU Cipta Kerja memiliki keuntungan dan menjadi bentuk keberpihakan pemerintah.
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Simpang siurnya informasi mengenai isi dari UU Cipta kerja yang dinilai masyarakat terdapat bentuk oligarki para penyokong Pemerintah.	Sisi lain dari UU Cipta Kerja sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat melalui peizinan usaha dan membantu UMKM.
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Adanya demonstrasi oleh masyarakat yang dilakukan besar-besaran. UU Cipta Kerja dinilai akan merugikan para kaum buruh dan usaha kecil, dan hanya menguntungkan penguhasa kelas kakap. Terlihat adanya bentuk oligarki yang dilakukan para penyongkong pemerintah.	Mendukung para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih berkembang. Salah satu nilai dari UU Cipta Kerja membantuk perizinan usaha agar lebih dipermudah. UU Cipta Kerja dinilai sebagai suatu bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kalangan menengah kebawah.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Pemerintah diharapkan agar dapat merampingkan UU lewat pembahasan perundang-undangan secara komprehensif dengan adanya transparansi data, karena pentingnya partisipasi dan peran masyarakat dalam hal tersebut.	Dengan adanya UU Cipta Kerja dapat mendukung usaha kecil milik pelaku usaha di Indonesia dalam hal perizinan dan membantuk berkembangnya Usaha mikro maupun Koperasi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Vivanews & Tirto.id memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengkonstruksi realitas (peristiwa pengesahan RUU Cipta Kerja/Omnibus Law). Vivanews memilih untuk tidak terlalu banyak memberikan ruang tentang penentangan masyarakat terhadap pemerintah dalam pemberitaannya, sementara Tirto.id sebaliknya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kebijakan editorial dan ideologi masing-masing media, di mana Vivanews sebagai surat kabar dengan pemilik yang berlatar belakang politik lebih menunjukkan sikap yang sangat hati-hati ketika memberitakan hal-hal yang sensitif karena bersinggungan dengan unsur SARA atau kekuasaan. Sementara kebijakan Tirto.id lebih aspiratif terhadap selera pasar yakni ketidaksetujuan masyarakat Indonesia terutama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan korporat, sehingga berita-berita yang mengandung unsur penolakan, ketidaksetujuan dan kontroversi mendapat ruang yang cukup banyak di dalam pemberitaan medianya.

Dalam melakukan pembingkaihan (*framing*) terhadap kasus ini, kedua media pada dasarnya menggunakan perangkat *framing* yang tidak jauh berbeda mencakup unsur-unsur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hanya saja dalam penggunaannya ada penonjolan-penonjolan dan kecondongan pihak yang berbeda dan bertolak belakang.

Tirto.id nampak lebih maksimal dalam penggunaan keempat unsur framing tersebut, sementara Vivaneews lebih mengarah pada penggunaan perangkat *framing* secara halus sehingga pemberitaannya cenderung datar dan monoton.

Dalam merepresentasikan atau membingkai peristiwa pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), kedua media nampaknya masih terpancang pada kecondongan pihak yang selama ini sangat kuat melingkupi dunia politik. Terlihat belum ada sikap media yang netral tidak ada keberpihakan.

BIBLIOGRAFI

- Akil, M. A. (2014). Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 137–145.
- Bungin, B. M. (2011). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana.
- Entman, R. M. (2004). *Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and US Foreign Policy*. University of Chicago Press.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS.
- Fiorentina, R., Mayasari, M., & Hariyanto, F. (2018). Analisis Framing Pemberitaan “Reuni Akbar 212”(Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online kompas. com dengan Republika. co. id Edisi 26 November 2017–9 Desember 2017). *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 84–93.
- Indriastuti, Y. (2018). Women Participation in Politics and Use of Digital Technology to Access Political Information. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 1–10.
- Kurniasari, N., & Aji, G. G. (2018). Kepemilikan Dan Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo Sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(1), 96. <https://doi.org/10.30659/jikm.6.1.96-116>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mosal.
- Morissan. (2010). *Komunikasi Media : Media, Budaya, dan Masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Romli, A. S. M. (2012). *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendekia.
- Sobur, A. (2004). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sobur Alex. (2013). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprobo, T., Siahainenia, R., & Sari, D. K. (2016). Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Profil dan Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti (Studi Pada Situs Berita Detik. com, Kompas. com dan Antaranews. com periode Oktober-Desember 2014). *Cakrawala*, 5(1).

Wicaksono, A. (2017). *Analisis Framing Berita Dugaan Kriminalisasi SBY Terhadap Antasari Azhar Di Media Online Detik.com Dan Sindonews.com, Periode 14-15 Februari 2017.*